



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1315 /SEK.01.W2-TUN3/RA1.6/IX/2026

Serang, 3 September 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

H a l : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Kepada Yth;

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

C.q. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di-

J A K A R T A

Memenuhi ketentuan Pasal 446 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta Surat Edaran Sekretaris MA-RI Nomor 042-I/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Bersama ini Kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran untuk DIPA-01 dan DIPA-05 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode sampai dengan Bulan Agustus 2026 dengan rekapitulasi serapan anggaran sebagai berikut:

No	DIPA		JENIS BELANJA	PERSENTASE
1.	01-Badan Urusan Administrasi	-	- Belanja Pegawai	76,86%
		-	- Belanja Barang Operasional	60,25%
		-	- Belanja Barang Non Operasional	80,81%
		-	- Belanja Modal	99,30%
		Total Realisasi DIPA (01)		75,45%
2.	05-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	-	- Pengamanan Sidang	62,50%
		-	- Prodeo	0,00%
		-	- Posbakum	55,43%
		-	- Sidang Diluar Gedung Pengadilan	29,20%
		Total Realisasi DIPA (05)		46,39%

Lembar realisasi anggaran (LRA) sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.



Ditandatangani secara elektronik oleh
PLH. SEKRETARIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SUFU ARIYANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua PTUN Serang sebagai laporan;
2. Wakil Ketua PTUN Serang sebagai laporan;
3. Arsip.

No.	JABATAN	PARAF
1		
2	ESELON III	
3	ESELON IV	

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Periode Agustus 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
DIPA : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
SATUAN KERJA : 690202 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi Tahun 2025				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
JUMLAH SELURUHNYA	74.313.000	30.868.431	3.603.429	34.471.860	46,39	39.841.140
WA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	74.313.000	30.868.431	3.603.429	34.471.860	46,39	39.841.140
WA.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	74.313.000	30.868.431	3.603.429	34.471.860	46,39	39.841.140
AEA Koordinasi	12.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	62,50	4.500.000
AEA.003 Dukungan Penyelesaian Perkara	12.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	62,50	4.500.000
005 Dukungan Penyelenggara Tugas Dan Fungsi Unit	12.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	62,50	4.500.000
051 Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	62,50	4.500.000
521211 Belanja Bahan	12.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	62,50	4.500.000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	405.000	0	0	0	0	405.000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	405.000	0	0	0	0	405.000
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	405.000	0	0	0	0	405.000
A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tk. Pertama	405.000	0	0	0	0	405.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	0	0	0	180.000
521211 Belanja Bahan	225.000	0	0	0	0	225.000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.908.000	16.191.431	2.603.429	18.794.860	55,43	15.113.140
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.908.000	16.191.431	2.603.429	18.794.860	55,43	15.113.140
005.0 Pos Bantuan Hukum	33.908.000	16.191.431	2.603.429	18.794.860	55,43	15.113.140
521211 Belanja Bahan	4.508.000	16.191.431	2.603.429	2.240.000	55,43	2.268.000
522131 Belanja Jasa Konsultan	29.400.000	1.920.000	2.283.429	16.554.860	56,31	12.845.140
OCA.Perkara Hukum Perseorangan	32.000.000	14.271.431	0	8.177.000	29,20	19.823.000
QBA.002 Perkara yg dilayani melalui sidang diluar gedung pengadilan Tata Usaha Negara	28.000.000	8.177.000	0	8.177.000	29,20	19.823.000
005.0 Dukungan Penyelenggara Tugas Dan Fungsi Unit	28.000.000	8.177.000	0	8.177.000	29,20	19.823.000
005.0A Sidang Diluar Gedung Pengadilan	28.000.000	8.177.000	0	8.177.000	29,20	19.823.000
522191 Belanja jasa Lainnya	600.000	0	0	8.177.000	0,00	600.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.400.000	8.177.000	0	8.177.000	29,84	19.223.000



Ditandatangani secara elektronik oleh
PLH. SEKRETARIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SUFI ARIYANI

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Periode Agustus 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 DIPA : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 SATUAN KERJA : 689313 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi Tahun 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
JUMLAH SELURUHNYA	27.186.969.000	0	19.191.758.252	1.319.569.798	20.511.328.050	75,45	6.675.640.950
WA Program Dukungan Manajemen	27.186.969.000	0	19.191.758.252	1.319.569.798	20.511.328.050	75,45	6.675.640.950
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
EBB 951 Layanan Sarana Internal	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
53 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
053.0A Pengadaan Kursi dan Meja CPNS	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	0	16.900.000	2.960.000	19.860.000	99,30	140.000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	27.186.969.000	0	19.174.858.252	1.316.809.798	20.491.468.050	75,43	6.675.500.950
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.186.969.000	0	19.174.837.252	1.316.809.798	20.491.247.050	75,43	6.675.421.950
EBA 962 Layanan Umum	14.420.000	0	11.652.699	0	11.652.699	80,81	2.767.301
5 Dukungan Penyelenggara Tugas dan Fungsi Unit	14.420.000	0	11.652.699	0	11.652.699	80,81	2.767.301
051.0B Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ekstrakomtable	1.080.000	0	954.599	0	954.599	88,39	125.401
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable	1.080.000	0	954.599	0	954.599	88,39	125.401
005.0B Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	13.340.000	0	10.698.100	0	10.698.100	80,20	2.641.900
521219.Belanja Barang Non Operasional lainnya	13.340.000	0	10.698.100	0	10.698.100	80,20	2.641.900
EBA.94 Layanan Perkantoran	27.152.249.000	0	19.162.984.553	1.316.809.798	20.479.594.351	75,43	6.672.654.648
001 Gaji dan Tunjangan	24.800.603.000	0	17.907.293.557	1.155.422.342	19.062.715.899	76,86	5.737.887.101
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	24.800.603.000	0	17.907.293.557	1.155.422.342	19.062.715.899	76,86	5.737.887.101
51111 Belanja dan Gaji Pokok PNS	1.490.166.000	0	1.477.471.100	138.904.700	1.616.375.800	108,47	-126.209.800

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi Tahun 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.000	0	18.744	1.846	20.390	47,42	22.610
511121 Belanja Tunj Suami/Istri PNS	174.000.000	0	101.577.816	10.027.120	111.604.936	64,14	62.395.064
511122 Belanja Tunj Anak PNS	58.100.000	0	35.854.678	3.100.520	38.955.198	67,05	19.144.802
511123 Belanja Tunj Struktural PNS	42.927.000	0	25.920.000	2.880.000	28.800.000	67,09	14.127.000
511124 Belanja Tunj Fungsional PNS	91.000.000	0	49.590.000	579.000	55.380.000	60,86	35.620.000
511125 Belanja Tunj PPh PNS	13.500.000	0	8.207.105	87.638	8.294.743	61,44	5.205.257
511126 Belanja Tunj Beras PNS	130.000.000	0	78.213.600	7.242.000	85.455.600	65,74	44.544.400
511129 Belanja Uang Makan PNS	364.191.000	0	159.779.000	30.438.000	190.217.000	52,23	173.974.000
511151 Belanja Tunj Umum PNS	31.400.000	0	12.150.000	1.290.000	13.440.000	42,80	17.960.000
511324 Belanja Tunj PPh Pejabat Negara	4.388.489.000	0	3.310.955.502	166.182.670	3.477.138.172	79,23	911.350.828
511339 Belanja Tunj Penghasilan Pejabat Negara	17.910.953.000	0	12.230.400.000	734.700.000	12.965.100.000	72,39	4.945.853.000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	200.000	0	294.317.100	35.674.800	329.991.900	164,99	-329.791.900
511619 Belanja Pembulatan Gaji Pokok PPPK	7.000	0	5.178	596	5.774	82,49	1.226
511621 Belanja Tunj Suami/Istri PPPK	45.000	0	27.039.361	3.316.330	30.355.691	67,45	-30.310.691
511622 Belanja Tunj Anak PPPK	20.000	0	7.472.123	955.942	8.428.065	42,12	-8.408.065
511625 Belanja Tunj Beras PPPK	10.000	0	22.631.250	2.824.380	25.455.630	254,55	-25.445.630
511628 Belanja Uang Makan PPPK	105.512.000	0	47.541.000	9.806.000	57.347.000	54,35	48.165.000
511633 Belanja Tunj Umum PPPK	40.000	0	18.150.000	2.200.000	20.350.000	50,88	-20.310.000
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.351.648.000	0	1.255.690.990	161.187.456	1.416.878.452	60,25	934.767.548
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	604.992.000	0	280.196.200	49.815.950	330.012.150	54,55	274.979.850
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	547.592.000	0	257.744.800	45.163.750	302.908.550	55,32	244.683.450
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2.400.000	0	2.363.500	0	2.363.500	98,48	36.500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.000.000	0	20.087.900	4.652.200	24.740.100	44,98	30.259.900
002.0B Layanan Daya Dan Jasa	456.012.000	0	238.054.813	38.283.224	276.338.037	60,60	179.673.963
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	199.706.000	0	92.660.350	15.315.225	107.975.575	54,07	91.730.425
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.800.000	0	2.563.500	1.675.000	4.238.500	39,25	6.561.500
522111 Belanja Langganan Listrik	211.644.000	0	118.416.458	20.824.415	139.240.873	65,79	72.403.127
522112 Belanja Langganan Telepon	2.362.000	0	207.900	0	207.900	8,80	2.154.100
522141 Belanja Sewa	31.500.000	0	24.206.605	468.584	24.675.189	78,33	6.824.811
002.0C Pemeliharaan Kantor	723.920.000	0	371.457.364	48.488.282	419.945.646	58,01	303.974.354
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	373.340.000	0	233.159.500	19.561.000	252.720.500	67,69	120.619.500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.580.000	0	138.297.864	28.927.282	167.225.146	47,70	183.354.854
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	131.741.000	0	73.469.000	6.140.000	73.609.000	60,43	52.132.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	70.755.000	0	36.629.000	0	36.629.000	51,77	34.126.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60.986.000	0	36.840.000	6.140.000	42.980.000	70,48	18.006.000
002.0E Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan	3.600.000	0	1.200.000	0	1.200.000	33,33	2.400.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	3.600.000	0	1.200.000	0	1.200.000	33,33	2.400.000
002.0G Konsultasi Ke Pusat /Tingkat Banding	114.750.000	0	42.683.619	1.060.000	43.743.619	38,12	71.006.381
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.750.000	0	42.683.619	1.060.000	43.743.619	38,12	71.006.381
002.0H Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL/INTANSI TERKAIT	591.000	0	0	0	0	0,00	591.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	591.000	0	0	0	0	0,00	591.000
002.0I Hak dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc	315.360.000	0	247.950.000	17.400.000	265.350.000	84,14	50.010.000

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi Tahun 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
522141 Belanja Sewa	315.360.000	0	247.950.000	17.400.000	265.350.000	84,14	50.010.000
002.0J Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000	0	680.000	0	680.000	100,00	0
52252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable	680.000	0	680.000	0	680.000	100,00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	221.000	0	221.000	73,67	79.000
EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	221.000	0	221.000	73,67	79.000
005 Dukungan Penyelenggara Tugas dan Fungsi Unit	300.000	0	221.000	0	221.000	73,67	79.000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	221.000	0	221.000	73,67	79.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	221.000	0	221.000	73,67	79.000



Ditandatangani secara elektronik oleh
 PLH. SEKRETARIS
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
 SUFI ARIYANI